

**BUPATI JEMBRANA**  
**PERATURAN BUPATI JEMBRANA**

**NOMOR 14 TAHUN 2006**

**TENTANG**  
**BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, 12, 13 dan 15 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, disebutkan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan yang terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia Anggaran, Tunjangan Badan Kehormatan dan tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonersia Nomor 1655 );

2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah .....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 48; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 );
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 ).
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2006 ( Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 1 );

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN JEMBRANA.

##### Pasal 1

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi ;
  - b. Uang Paket ;
  - c. Tunjangan Jabatan ;
  - d. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
-

- e. Tunjangan Komisi ;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 2

Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana setiap bulan sebagai berikut :

- a. Uang Representasi :
  - Kctua scbcsar Rp. 2.100.000,-
  - Wakil Ketua Masing-masing sebesar Rp. 1.680.000,-
  - Anggota masing-masing scbcsar Rp. 1.575.000,-
- b. Uang Paket :
  - Ketua sebesar Rp. 210.000,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 168.000,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 157.500,-
- c. Tunjangan Jabatan :
  - Ketua scbcsar Rp. 3.045.000,-
  - Wakil Ketua masing-masing scbcsar Rp. 2.436.000,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 2.283.750,-
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah :
  - Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua masing-masing scbcsar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 91.350,-
- e. Tunjangan Komisi :
  - Ketua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua sebesar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota sebesar Rp. 91350,-
- f. Tunjangan Panitia Anggaran :
  - Kctua sebesar Rp. 228.375,-
  - Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp. 152.250,-
  - Sekretaris sebesar Rp. 121.800,-
  - Anggota masing-masing sebesar Rp. 91.350,-

g. Tunjangan Badan Kehormatan.....

g- Tunjangan Badan Kehormatan :

- Ketua sebesar	Rp.	228.375,-
- Wakil Ketua sebesar	Rp.	152.250,-
- Sekretaris sebesar	Rp.	121.800,-
- Anggota sebesar	Rp.	91.800,-

h. Tunjangan Keluarga :

- Ketua (1 istri dan 2 anak) sebesar	Rp.	294.000,-
- Wakil Ketua (1 istri dan 2 anak) masing-masing	Rp.	235.200,-
- Anggota (1 istri dan 2 anak) masing-masing	Rp.	220.500,-

j. Tunjangan Beras :

- Ketua ( 1 istri dan 2 anak ) sebesar	Rp.	120.360,-
- Wakil Ketua ( 1 istri dan 2 anak ) masing-masing	Rp.	120.360,-
- Anggota ( 1 istri dan 2 anak ) masing-masing	Rp.	120.360,-

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

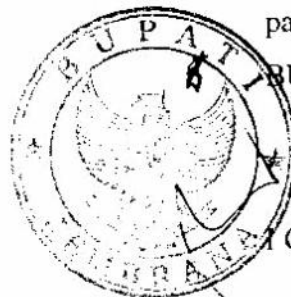
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Rupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara

pada tanggal : 20 Juni 2006

BUPATI JEMBRANA

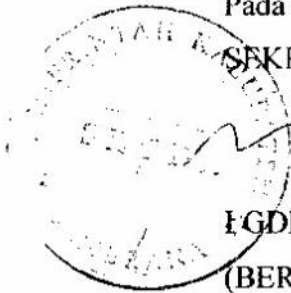


GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal : 20 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,



GEDE SUINAYA

(BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006 NOMOR, 14).